



Mengonseptualisasikan dan Mengimplementasikan Kebijakan Pemuda Kabupaten Grobogan Berbasis Strategi Modern

Diah Wulan Dari

Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Indonesia

Alamat : Jl. Prof. Soedarto, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi penulis : wdiah19@gmail.com*

Abstract. *This study aims to identify efforts to improve the effectiveness of youth policies in Grobogan Regency in facing global challenges. The study shows a significant evolution in the approach to youth policy-making between 2020 and 2024, marked by a shift from a paternalistic model to an active participation and partnership model. The analysis of best practices reveals trends in youth policy formulation and implementation with integrated, participatory, and technologically advanced strategies. The success of these practices is characterized by effective cross-sector collaboration, active youth involvement in decision-making processes, and extensive use of digital platforms. Using Grobogan Regency as an example, the study identifies key issues in youth policy implementation, including inadequate youth involvement in decision-making processes, mismatches between education programs and labor market requirements, and social disparities between youth living in rural and urban areas. This study uses comparative analysis, legislative evaluation, and institutional review. The research findings indicate the need for a comprehensive approach to improve the effectiveness of youth policies, including strengthening interagency collaboration, increasing opportunities for active youth participation, developing digital platforms, and improving mechanisms to support youth entrepreneurship. A key element in improving effectiveness is the development and implementation of a comprehensive system to assess the effectiveness of youth policies, based on clear indicators and regular monitoring such as the calculation of the Youth Development Index (Indeks Pembangunan Pemuda/IPP) which has been carried out at the national and Central Java Provincial levels.*

Keywords : *Youth, Comparative, Collaborative, Innovative approach*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya-upaya peningkatan efektivitas kebijakan kepemudaan di Kabupaten Grobogan dalam menghadapi tantangan global. Penelitian ini menunjukkan adanya evolusi signifikan dalam pendekatan pembuatan kebijakan kepemudaan antara tahun 2020 dan 2024, yang ditandai dengan pergeseran dari model paternalistik ke model partisipasi aktif dan kemitraan. Analisis praktik-praktik terbaik mengungkap tren dalam perumusan dan implementasi kebijakan kepemudaan dengan strategi yang terpadu, partisipatif, dan berteknologi maju. Keberhasilan praktik-praktik tersebut ditandai dengan kolaborasi lintas sektor yang efektif, keterlibatan aktif pemuda dalam proses pengambilan keputusan, dan penggunaan platform digital secara luas. Dengan mengambil contoh Kabupaten Grobogan, penelitian ini mengidentifikasi isu-isu utama dalam implementasi kebijakan kepemudaan, termasuk keterlibatan pemuda yang tidak memadai dalam proses pengambilan keputusan, ketidaksesuaian antara program pendidikan dan persyaratan pasar tenaga kerja, dan kesenjangan sosial antara pemuda yang tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan. Kajian ini menggunakan analisis komparatif, evaluasi legislatif, dan tinjauan kelembagaan. Temuan penelitian menunjukkan perlunya pendekatan komprehensif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kepemudaan, termasuk memperkuat kolaborasi antarlembaga, meningkatkan kesempatan bagi partisipasi aktif pemuda, mengembangkan platform digital, dan meningkatkan mekanisme untuk mendukung kewirausahaan pemuda. Elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas adalah pengembangan dan penerapan sistem yang komprehensif untuk menilai efektivitas kebijakan kepemudaan, berdasarkan indikator yang jelas dan pemantauan berkala seperti perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang telah dilakukan di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Katakunci : Pemuda, Komparatif, Kolaboratif, Pendekatan Inovatif

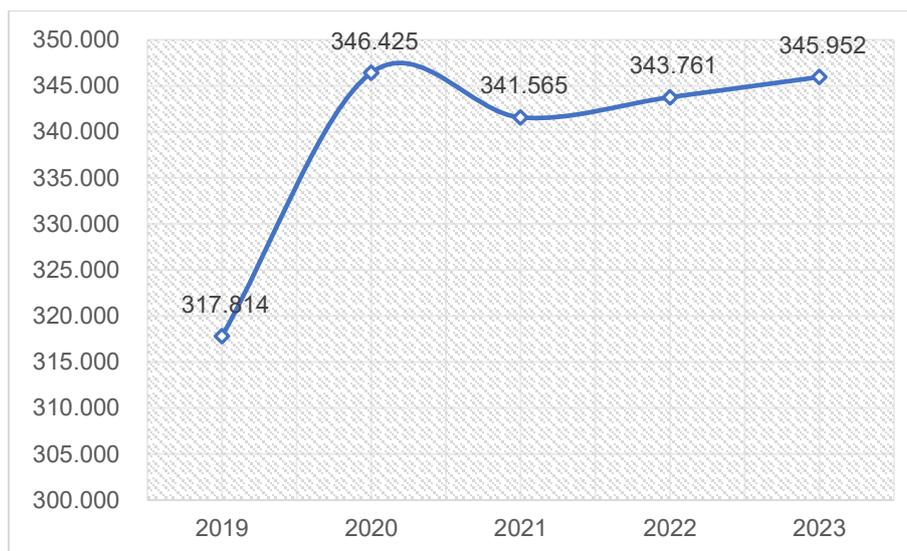
1. PENDAHULUAN

Pemuda memainkan peranan kunci dalam pembangunan negara dan masyarakat, dalam kondisi globalisasi dan perubahan ekonomi perubahan sosial ekonomi yang cepat saat ini. Salah satunya dilakukan dalam bentuk mendorong adanya inovasi teknologi melalui

perusahaan rintisan dan percepatan industri teknologi. Pemuda juga sering kali dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan publik, keikutsertaan pemuda dalam musyawarah pembangunan daerah untuk menyuarakan kebutuhan pemuda dalam pembangunan. Selain itu pemuda juga berperan dalam mendorong kemajuan ekonomi sebagai wirausahawan dan profesional terampil. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kontribusi pemuda sangat jelas terlihat dalam adopsi teknologi digital dan promosi reformasi sosial dan ekonomi. Yang paling penting adalah kebijakan pemuda negara yang efektif yang mampu menanggapi tantangan zaman dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pemenuhan diri generasi muda. Dalam konteks Indonesia, negara dengan ekonomi yang berkembang secara dinamis dan profil demografi muda, isu-isu tentang konseptualisasi dan implementasi kebijakan pemuda negara menjadi sangat relevan.

Tantangan global seperti perubahan iklim, kemajuan teknologi yang pesat, dan pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan terhadap kaum muda di seluruh dunia, membentuk prospek pendidikan, ekonomi, dan sosial mereka. Di Indonesia, pergeseran global ini telah terwujud dalam beberapa cara, termasuk ketidaksesuaian antara program pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja, meningkatnya permintaan akan keterampilan digital, dan perlunya keterlibatan kaum muda yang lebih besar dalam menangani masalah lingkungan. Tekanan global ini menggarisbawahi perlunya kebijakan pemuda yang tidak hanya menanggapi kondisi sosial ekonomi lokal tetapi juga selaras dengan tren internasional. Dengan mengadaptasi kebijakan pemuda terhadap tantangan global ini, Indonesia dapat memastikan bahwa kaum mudanya dibekali untuk memenuhi tuntutan saat ini dan masa depan.

Tren jumlah penduduk usia muda di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal yang serupa juga terjadi di Kecamatan Grobogan, yang juga mengalami kenaikan jumlah penduduk usia muda. Tercatat jumlah pemuda di Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 sebanyak 317.814 orang; pada tahun 2020 sebanyak 346.425 orang. Jumlah pemuda mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga mencapai 341.565 orang. Sedangkan pada tahun 2022 – 2023, jumlah pemuda di Kabupaten Grobogan kembali mengalami peningkatan. Pada akhir 2023, jumlah pemuda Kabupaten Grobogan sebanyak 345.952 orang.



Sumber: Profil Data Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 1. Jumlah Pemuda di Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023

Peningkatan jumlah pemuda ini menjadi keuntungan sekaligus tantangan untuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberdayakan pemuda untuk membantu pengembangan wilayah di Kabupaten Grobogan. Menangkap tingginya potensi pemuda, mengharuskan adanya formulasi dan implementasi kebijakan pembangunan dan pengembangan pemuda yang tepat di Kabupaten Grobogan. Permasalahan dari studi ini adalah perlunya menganalisis secara kritis dan memikirkan kembali pendekatan yang ada terhadap perencanaan dan implementasi kebijakan pemuda di Kabupaten Grobogan. Meskipun ada upaya pemerintah yang cukup besar di bidang ini, ada serangkaian masalah sistemik, seperti keterlibatan kaum muda yang kurang optimal dalam proses pengambilan keputusan, ketidakcukupan program pendidikan untuk memenuhi persyaratan pasar tenaga kerja, kesenjangan sosial, dan terbatasnya kesempatan bagi kaum muda dari daerah pedesaan. Tantangan-tantangan ini memerlukan pengembangan strategi baru yang mengakomodasi tren global dan kekhasan (*local wisdom*) Kabupaten Grobogan.

Analisis penelitian kontemporer di bidang kebijakan pemuda mengungkap serangkaian tren utama dan . Secara khusus, isu partisipasi pemuda dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan patut mendapat perhatian khusus. Walther et al., (2021) menyajikan pendekatan yang menarik untuk masalah ini. Para peneliti melakukan analisis komparatif terhadap kebijakan pemuda dan bentuk partisipasi pemuda di berbagai kota Eropa, yang mengungkap keberadaan “rezim partisipasi” yang berbeda. Studi ini menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks lokal saat mengembangkan strategi untuk keterlibatan

politik pemuda. Namun, pertanyaannya tetap terbuka mengenai penerapan model yang diidentifikasi dalam kondisi negara berkembang. Malorni et al., (2024) mengusulkan kerangka konseptual untuk memahami perkembangan sosial politik pemuda minoritas ras dan gender. Studi ini menekankan perlunya mempertimbangkan keragaman kelompok pemuda saat membentuk kebijakan publik. Namun, kekhususan komposisi etnis dan hubungan gender memerlukan penyelidikan tambahan untuk mengadaptasi konsep yang diusulkan.

Yang menarik dalam konteks pengembangan ekonomi digital adalah studi oleh Masenya (2021) tentang strategi pengembangan *technopreneurship* di kalangan anak muda. Peneliti tersebut menekankan pentingnya keterampilan digital untuk wirausaha anak muda di lingkungan modern. Namun, pertanyaan tentang bagaimana mengintegrasikan strategi tersebut secara efektif ke dalam keseluruhan struktur kebijakan pemuda masih terbuka. Lerner et al., (2021) memberikan kontribusi signifikan untuk memahami perkembangan pemuda yang positif. Studi mereka menawarkan kerangka teoritis untuk mengembangkan program untuk mempromosikan keadilan sosial di kalangan anak muda. Namun, penerapan ide-ide ini memerlukan pertimbangan fitur sosial budaya lokal yang spesifik.

Studi yang disunting oleh Dimitrova & Wium (2021) menyajikan pandangan komprehensif tentang pengembangan pemuda yang positif dalam konteks global. Para peneliti menyusun praktik terbaik dalam penelitian, kebijakan, dan praktik di area ini, yang dapat menjadi sumber daya berharga bagi para pembuat kebijakan pemuda. Namun, pertanyaan tentang bagaimana mengadaptasi pengalaman internasional dengan kondisi wilayah tertentu tetap terbuka. Dalam konteks tantangan global seperti pandemi COVID-19, studi oleh Ettekal & Agans (2020) tentang peran waktu luang dalam pengembangan positif kaum muda menjadi sangat relevan. Para peneliti menekankan pentingnya mengadaptasi program pengembangan pemuda dengan kondisi baru, yang khususnya dalam periode pemulihan pascapandemi.

Dengan demikian, analisis penelitian terkini di bidang kebijakan pemuda mengungkap serangkaian bidang utama yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut dalam konteks pembangunan dan pengembangan kepemudaan. Bidang-bidang tersebut meliputi mengadaptasi model-model internasional partisipasi pemuda ke dalam kondisi lokal, menggabungkan keragaman etnis dan gender ke dalam pengembangan kebijakan, mengintegrasikan strategi *technopreneurship*, menerapkan konsep-konsep pengembangan pemuda yang positif yang mengakomodasi fitur-fitur sosial budaya spesifik wilayah tersebut, dan mengadaptasi kebijakan pemuda ke dalam tantangan-tantangan global seperti pandemi. Studi ini bertujuan untuk berkontribusi dalam mengisi kesenjangan-kesenjangan ini dengan

menawarkan analisis komprehensif tentang strategi-strategi kontemporer untuk mengonseptualisasikan dan mengimplementasikan kebijakan pemuda di Kabupaten Grobogan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemuda Kabupaten Grobogan dalam konteks tantangan global. Untuk memenuhi tujuan tersebut, ditetapkan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

- Untuk mempertimbangkan landasan teoritis dan pendekatan metodologis terhadap pembentukan kebijakan pemuda dalam konteks modern.
- Untuk menganalisis praktik terbaik internasional dalam strategi kerja inovatif di bidang pemuda.
- Untuk mengidentifikasi masalah utama dan menilai efektivitas mekanisme yang ada untuk implementasi kebijakan pemuda di Kabupaten Grobogan.

2. METODE

Studi ini menganalisis peraturan yang mengatur kebijakan pemuda di tingkat nasional dan daerah. Perhatian khusus diberikan kepada dokumen-dokumen regulasi utama yang mengamatkan adanya pembangunan dan pengembangan kepemudaan. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kepemudaan, yang menetapkan kerangka hukum untuk pengembangan dan implementasi kebijakan pemuda negara di Indonesia. Studi ini juga menganalisis Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan, yang merupakan dokumen komprehensif yang mendefinisikan prioritas kebijakan pemuda di provinsi Jawa Tengah. Perhatian khusus diberikan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Grobogan yang memuat arah pembangunan kepemudaan dan dokumen kebijakan tentang kepemudaan lainnya. Analisis dokumen-dokumen ini membantu tidak hanya untuk mengidentifikasi tren-tren utama dalam regulasi hukum kebijakan pemuda, tetapi juga untuk melakukan analisis komparatif terperinci dari pendekatan-pendekatan legislatif di tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten. Hal ini membantu mengidentifikasi fitur-fitur umum dan kekhususan (kearifan lokal) dalam pengembangan kerangka regulasi untuk kebijakan kepemudaan, serta menilai sejauh mana legislasi menjawab tantangan dan kebutuhan kontemporer generasi muda.

Untuk menyelidiki mekanisme kelembagaan dalam mengimplementasikan kebijakan pemuda, penelitian ini menganalisis struktur dan aktivitas badan pemerintah terkait yang bertanggung jawab untuk bekerja dengan pemuda di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini meninjau aktivitas Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan,

serta struktur serupa di wilayah lainnya termasuk di negara lain. Penelitian ini menggunakan statistik resmi yang mencerminkan situasi kaum muda di berbagai bidang masyarakat. Secara khusus, data dari Profil Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, yang berisi informasi tentang kondisi makro pemuda, kondisi pembangunan pengembangan pemuda, sarana dan prasarana kepemudaan, dan indikator lainnya.

Pemilihan wilayah untuk penelitian ini dipandu oleh kriteria tertentu untuk memastikan analisis yang komprehensif dan komparatif. Kriteria ini mencakup keragaman tingkat pembangunan sosial-ekonomi, ketersediaan kerangka legislatif yang membahas kebijakan pemuda, dan penerapan pendekatan inovatif untuk keterlibatan pemuda. Pemilihan Kabupaten Grobogan sebagai lokus penelitian selain karena jumlah penduduk usia muda di Kabupaten Grobogan yang tinggi (22,85% dari total penduduk di tahun 2024), juga karena belum adanya kerangka regulasi pembangunan kepemudaan di Kabupaten Grobogan baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati, sehingga penelitian ini akan menjadi langkah awal sebagai bekal untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan dan pengembangan pemuda di Kabupaten Grobogan dengan memeriksa adaptasi tren global terhadap realitas lokal, meninjau arah pembangunan dan pengembangan kepemudaan di tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.

Meskipun belum ada regulasi secara internal terkait pembangunan kepemudaan, namun selama ini telah banyak program/kegiatan untuk mendorong terwujudnya pembangunan kepemudaan di Kabupaten Grobogan, sehingga untuk menilai efektivitas program dan inisiatif kebijakan pemuda yang ada, studi ini meninjau laporan tentang implementasi program pemerintah terkhusus dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan. Analisis materi ini membantu mengidentifikasi pencapaian dan aspek yang bermasalah dalam implementasi kebijakan pemuda. Untuk memperkuat penilaian ini, sistem komprehensif dikembangkan yang menggabungkan indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator ini mencakup tingkat pekerjaan, partisipasi pemuda dalam proses pengambilan keputusan, dan keselarasan antara hasil pendidikan dan permintaan pasar tenaga kerja. Selain itu, survei dan kelompok fokus dengan kaum muda dilakukan untuk mengumpulkan persepsi mereka tentang kebijakan dan dampaknya. Siklus pemantauan rutin dan tolok ukur yang jelas ditetapkan untuk menilai kemajuan, dengan penyesuaian berbasis data terhadap implementasi kebijakan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dari statistik resmi, umpan balik pemuda, dan penilaian ahli.

Studi ini menggunakan metode analisis komparatif untuk mengidentifikasi tren umum dan fitur tertentu dalam implementasi kebijakan pemuda di berbagai negara. Pendekatan

terhadap pembuatan kebijakan pemuda di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia dibandingkan, membantu mengidentifikasi fitur universal dan khusus dalam strategi kerja pemuda. Untuk menilai efektivitas mekanisme yang ada untuk mengimplementasikan kebijakan pemuda di Kabupaten Grobogan, tujuan yang dinyatakan dan hasil yang dicapai dibandingkan dan data statistik dan pendapat ahli dianalisis. Ini membantu mengidentifikasi masalah utama dan menentukan area untuk meningkatkan kebijakan pemuda. Untuk menganalisis dampak digitalisasi pada kebijakan pemuda, materi tentang implementasi inisiatif digital dalam pekerjaan pemuda dilakukan peninjauan di berbagai negara atau wilayah, khususnya, pengalaman menciptakan dan mengoperasikan platform digital untuk melibatkan kaum muda dalam perumusan kebijakan publik dan proses politik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teoritis dan Pendekatan Metodologis Terhadap Pengembangan Kebijakan Pemuda dalam Konteks Modern

Dalam konteks kontemporer (2020–2024), pengembangan kebijakan pemuda yang efektif di berbagai negara menjadi sangat penting dan relevan terhadap keberhasilan pembangunan, mengingat tantangan global dan kondisi sosial ekonomi yang berubah dengan cepat. Landasan teoritis dan pendekatan metodologis terhadap pengembangan kebijakan pemuda mengalami perubahan substansial, yang mencerminkan realitas dan kebutuhan baru generasi muda.

Konsep modern kebijakan pemuda didasarkan pada pemahaman pemuda sebagai sumber daya utama bagi pembangunan sosial ekonomi. Menurut Burkhard et al. (2020), konsep *positive youth development* atau pembangunan pemuda positif menekankan perlunya menciptakan lingkungan yang mendukung yang penuh dalam pembangunan pemuda, bukan sekadar pemecahan masalah dan pengambilan risiko. Pendekatan ini melibatkan pergeseran dari model paternalistik ke model kemitraan di mana pemuda dipandang sebagai peserta aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Kebijakan pemuda modern didasarkan pada serangkaian kerangka kerja konseptual yang saling terkait yang membentuk pendekatan holistik untuk bekerja dengan generasi muda (Nusubalieva et al., 2023). Inti dari sistem ini adalah menempatkan pemuda sebagai subjek pembangunan, dimana pemuda tidak lagi dianggap sebagai penerima layanan pasif, tetapi sebagai peserta aktif dalam proses sosial. Prinsip ini secara alami mengarah pada perlunya pendekatan partisipatif untuk memastikan bahwa pemuda benar-benar terlibat dalam pengembangan dan implementasi kebijakan di semua tingkatan. Ozer et al., (2020) mencatat

bahwapartisipasi pemuda dalam pengambilan keputusan akan dapat mendorong keberpihakan pengembangan keputusan dengan memperhatikan keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab sosial. Hal tersebut menggambarkan pentingnya penempatan pemuda sebagai subjek pembangunan dan juga menekankan pentingnya partisipasi mereka pemuda yang memerlukan koordinasi berbagai stakeholder dalam mewujudkannya.

Dalam dunia yang berubah dengan cepat, penerapan prinsip-prinsip di atas tidak mungkin dilakukan tanpa prinsip inovasi. Prinsip ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode kerja modern dengan kaum muda, yang memungkinkan kebijakan pemuda disesuaikan dengan realitas dan kebutuhan baru generasi muda. Dengan mengakui keberagaman pemuda sebagai kelompok sosial, kebijakan pemuda modern bergantung pada prinsip pendekatan yang berbeda. Prinsip ini mempertimbangkan keberagaman kelompok pemuda dan memastikan pengembangan langkah-langkah dukungan khusus untuk berbagai kategori kaum muda, yang memungkinkan pemenuhan prinsip-prinsip partisipasi yang lebih efektif. Artinya dalam pembangunan kepemudaan diperlukan lima prinsip yakni subjektivitas, partisipasi, kolaborasi lintas sektoral, inovasi, dan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah, untuk membentuk sistem yang saling terkait di mana setiap elemen mendukung dan memperkuat tindakan yang lain, menciptakan dasar untuk kebijakan pemuda yang komprehensif dan efektif dalam konteks modern (Podolyaka et al., 2021).

Evolusi kerangka konseptual untuk kebijakan pemuda antara tahun 2020 dan 2024 telah menyebabkan perubahan substansial dalam kerangka legislatif banyak negara. Perubahan ini diperlukan oleh kebutuhan untuk menyesuaikan peraturan dengan realitas dan pendekatan baru dalam pengembangan kebijakan kepemudaan. Contoh ilustratif dari adaptasi tersebut adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Regulasi ini tidak hanya mendefinisikan kerangka konseptual baru untuk kebijakan pemuda, tetapi juga meletakkan dasar untuk pengenalan pendekatan metodologis yang inovatif berbasis kolaborasi. Pada tahun 2020–2024, transformasi yang cukup besar dari pendekatan metodologis untuk pengembangan kebijakan pemuda terjadi. Transformasi ini didorong oleh kompleks faktor dan tren yang saling terkait. Realisasi kompleksitas dan sifat multifaset dari masalah yang dihadapi oleh pemuda kontemporer menyebabkan pergeseran dari pendekatan yang sangat terspesialisasi menjadi pendekatan interdisipliner yang terintegrasi. Kebijakan pemuda telah dianggap sebagai bidang yang membutuhkan integrasi pengetahuan dari berbagai bidang: sosiologi, psikologi, ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya. Transisi ini telah membantu memperkuat peran

pendekatan berbasis bukti. Pengembangan dan implementasi kebijakan pemuda semakin didasarkan pada temuan penelitian dan analisis efektivitas program yang ada, yang telah meningkatkan validitas dan efektivitas keputusan.

Sejalan dengan proses-proses ini, metodologi partisipatif telah berkembang. Pendekatan partisipatif terhadap desain program pemuda meningkatkan efektivitas program pemuda dan mempromosikan pengembangan kepemimpinan pemuda (Ozer et al., 2020). Perkembangan ini merupakan kelanjutan logis dari pengakuan pemuda sebagai subjek aktif hubungan sosial. Kemajuan teknologi dan digitalisasi masyarakat telah mengharuskan pengenalan teknologi digital ke dalam pengembangan dan implementasi kebijakan pemuda (Etemi & Uzunboylu, 2020). Penggunaan data besar dan kecerdasan AI membuka kemungkinan baru untuk menganalisis kebutuhan pemuda dan mengevaluasi efektivitas program pembangunan pemuda (Opris et al., 2020; Uludag, 2023). Realisasi keterkaitan berbagai aspek kehidupan kaum muda telah mengarah pada pengembangan pendekatan ekologis yang mempertimbangkan kebijakan pemuda dalam konteks interaksi berbagai sistem sosial. (Burkhard et al., 2020) menekankan pentingnya untuk dapat mempertimbangkan hubungan timbal balik antara karakteristik individu pemuda dan karakteristik lingkungan sosial mereka. Perubahan di pasar tenaga kerja dan di bidang sosial telah menuntut adanya peningkatan pengembangan *soft skills* di kalangan pemuda, sehingga program kebijakan pemuda harus diarahkan untuk semakin mulai berfokus pada pengembangan pemikiran kritis, kecerdasan emosional, keterampilan komunikasi, dan kemampuan beradaptasi (Gonzalez et al., 2020).

Transformasi pendekatan metodologis dalam kebijakan pemuda karena digitalisasi masyarakat yang cepat dan perubahan realitas sosial-ekonomi telah menyebabkan perlunya revisi substansial dari kerangka peraturan di banyak negara di seluruh dunia. Proses ini ditujukan untuk mengadaptasi undang-undang dengan tantangan baru era digital dan memastikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak pemuda dalam merespon danya lingkungan yang berubah. Prancis adalah salah satu negara pertama yang menanggapi perubahan ini dengan membuat penyesuaian yang cukup besar pada regulasi kepemudaan melalui perubahan *Education Code* No. L312-9. Perubahan ini mencakup bagian tentang kewarganegaraan digital dan pengembangan kompetensi digital untuk pemuda, sebagai respons terhadap meningkatnya peran teknologi digital dalam kehidupan generasi muda. Mengikuti Prancis, pada tahun 2021 *Law on the Protection of Children and Young People*. Undang-undang ini tidak hanya mencakup ketentuan tentang keselamatan digital pemuda, tetapi juga menetapkan aturan untuk penggunaan *platform daring* dalam pekerjaan pemuda, yang mencerminkan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap keselamatan pemuda di

ruang digital. Pada tahun yang sama, Kanada, menanggapi tren global dalam perlindungan data pribadi, mengubah *Protection and Electronic Documents Act*. Perubahan tersebut ditujukan untuk memperkuat perlindungan data pribadi kaum muda di lingkungan digital, sebagai tanggapan terhadap meningkatnya risiko yang terkait dengan penggunaan informasi pribadi secara daring. Selanjutnya, negara Estonia sebagai negara yang memberikan dukus besar pada kebijakan pemuda dan penggunaan teknologi modern (Junussova et al., 2025), melalui *Youth policies in Estonia* atau kebijakan Pemuda di Estonia menekankan pengembangan "pekerjaan pemuda yang cerdas" dengan menggunakan teknologi digital. Dari beberapa regulasi di negara-negara maju mencerminkan bahwa penting adanya komitmen negara untuk mempertahankan kepemimpinannya dalam digitalisasi untuk memastikan layanan berkualitas bagi kaum muda.

Prakarsa legislasi di berbagai negara maju menunjukkan pentingnya kerangka regulasi untuk menunjukkan adaptasi yang konsisten terhadap pendekatan metodologis baru dalam kebijakan pemuda. Ada tren tersebut menekankan pentingnya kompetensi digital dan keamanan daring secara komprehensif dalam penyusunan kebijakan pemuda dan inklusi digital. Pengembangan kebijakan pemuda modern terjadi dalam konteks proses global yang saling terkait dan kompleks yang secara substansial memengaruhi kehidupan dan prospek generasi muda. Proses ini menciptakan peluang baru dan tantangan serius yang memerlukan pendekatan adaptif dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi kebijakan pemuda. Faktor kunci yang mengubah semua aspek kehidupan pemuda adalah digitalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Seperti yang ditunjukkan Burkhard et al., (2020), teknologi digital menawarkan peluang baru bagi partisipasi pemuda dalam kehidupan sosial politik, tetapi juga menciptakan risiko dan tantangan baru. Revolusi teknologi ini tidak hanya mengubah cara orang berkomunikasi, belajar, dan bekerja, tetapi juga menciptakan realitas digital baru yang mengharuskan kebijakan pemuda untuk beradaptasi.

Digitalisasi terkait erat dengan perubahan sifat pekerjaan (Junussova et al., 2025). Munculnya *gig economy* dan otomatisasi mengubah pasar tenaga kerja, menciptakan kebutuhan akan pendekatan inovatif untuk melatih pemuda. (Ozer et al., 2020) menekankan perlunya kaum muda untuk mengembangkan keterampilan untuk beradaptasi dengan kondisi kerja yang berubah dengan cepat. Perubahan ini memengaruhi ketidaksetaraan sosial, memperlebar kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke peluang baru dan mereka yang merasa dikesualikan. Tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan krisis ekonomi memperburuk masalah yang ada dan menciptakan masalah baru (Chumak et al., 2022). Misalnya, pandemi COVID-19 tidak hanya menyebabkan perlunya program khusus

untuk mendukung kaum muda dalam pembelajaran jarak jauh dan lingkungan kerja, tetapi juga mempercepat proses digitalisasi, yang selanjutnya menyoroti pentingnya mengembangkan kompetensi digital (Cone et al., 2022). Perubahan demografi, seperti adanya fenomena *youth bulge* yang berimpact pada munculnya bonus demografi, memberikan konteks yang berbeda untuk penerapan kebijakan pemuda.

Dengan kondisi perubahan-perubahan tersebut, menyebabkan adanya transformasi *value* pemuda, sehingga sangat penting untuk mempertimbangkan perubahan-perubahan kondisi ketika merancang program-program pembangunan dan pengembangan pemuda (Burkhard et al., 2020). Proses-proses ini menggarisbawahi perlunya mengembangkan program-program yang ditujukan untuk memperkuat kerja sama pemuda ditingkat daerah, nasional dan internasional serta menumbuhkan pola pikir global dalam pembangunan dan pengembangan pemuda. Kebijakan pemuda yang efektif harus mengakomodasi kompleksitas ini, fleksibel dan adaptif, mampu menanggapi perubahan yang cepat dan tantangan-tantangan baru, sambil menciptakan kondisi-kondisi bagi generasi muda untuk membuka potensinya di dunia yang canggih dan terglobalisasi ini. Pengembangan kebijakan pemuda yang efektif dalam kondisi modern memerlukan pendekatan sistematis yang mengakomodasi keterkaitan berbagai faktor dan tren. Kebijakan pemuda yang berhasil harus adaptif, inklusif, dan berdasarkan pada partisipasi aktif kaum muda sendiri dalam proses pengembangan dan implementasinya.

Untuk memvisualisasikan evolusi pendekatan terhadap pengembangan kebijakan pemuda dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, selanjutnya dilakukan analisis komparatif terhadap konsep konvensional dan modern. Analisis ini membantu untuk melihat dengan jelas bagaimana aspek-aspek utama kebijakan pemuda telah berubah dalam menanggapi tantangan global dan kebutuhan baru generasi muda. Tabel 1 menyajikan kriteria utama yang dengannya transformasi pendekatan terhadap pengembangan dan implementasi kebijakan pemuda dapat dilacak, yang mencerminkan pergeseran dari model paternalistik ke model partisipasi dan kemitraan aktif, serta penggabungan faktor-faktor global dan perubahan teknologi ke dalam strategi kerja pemuda kontemporer.

Tabel 1. Analisis Komparatif Pendekatan Modern Terhadap Pengembangan Kebijakan Pemuda

Kriteria	Pendekatan konvensional (sampai 2020)	Pendekatan modern (2020–2024)
Dasar konseptual	Model paternalistik	Model kemitraan dan partisipasi
Peran pemuda	Objek	Subjek dan mitra aktif

Fokus kebijakan	Mengatasi tantangan dan mengatasi risiko	Pengembangan kapasitas dan penciptaan peluang
Pendekatan metodologis	Spesialis	Terpadu, interdisipliner
Penggunaan teknologi	Terbatas	Implementasi aktif teknologi digital
Pertimbangan faktor global	Terbatas	Analisis sistemik tren global
Pengembangan keterampilan	Penekanan pada keterampilan profesional	Keseimbangan antara <i>hard skills</i> dan <i>soft skills</i>
Mekanisme implementasi	Sebagian besar program pemerintah	Kolaborasi antarsektor
Evaluasi efektivitas	Indikator kuantitatif	Kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif
Kerangka regulasi	Fragmentaris	Komprehensif, mengakomodasi realitas terkini

Tabel ini menggambarkan evolusi pendekatan terhadap pembuatan kebijakan pemuda, yang mencerminkan pergeseran dari model paternalistis ke model partisipasi aktif dan kemitraan, serta penggabungan faktor global dan perubahan teknologi ke dalam strategi kerja pemuda kontemporer.

Masalah Utama dan Penilaian Efektivitas Mekanisme untuk Pelaksanaan Kebijakan Pemuda di Kabupaten Grobogan

Kebijakan pemuda di Kabupaten Grobogan pada periode 2021 hingga 2024 masih terkesan belum berkembang dengan optimal. Dari sisi kerangka kebijakan kepemudaan di Kabupaten Grobogan masih belum memiliki dasar hukum baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupaun Peraturan Bupati. Kebijakan kepemudaan di Kabupaten Grobogan selama ini masih menginduk pada Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 tahun 2009, beserta turunannya, dan juga mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021. Belum adanya regulasi tingkat kabupaten yang mengatur tentang kepemudaan menyebabkan pembangunan dan pengembangan kepemudaan di Kabupaten Grobogan belum fokus dan cenderung masih terabaikan.

Jika dilihat lebih rinci dalam UU 40 tahun 2009 dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2021, diatur bahwa pembangunan dan pengembangan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Dalam regulasi tersebut kebijakan pembangunan difokuskan pada penduduk usia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun, yang tidak sejalan dengan standar internasional dalam mendefinisikan kelompok usia pemuda dengan standar usia empat belas dan dua puluh sembilan tahun. Ketidak selarasan batasan usia pemuda

memunculkan adanya *missing* data pemuda di Kabupaten Grobogan. Fakta di lapangan menunjukkan adanya kesulitan penyediaan data akurat terkait jumlah pemuda di Kabupaten Grobogan berdasarkan usia 16-30 tahun. Kesulitan penyediaan data akurat terkait jumlah pemuda di Kabupaten Grobogan selanjutnya akan berimplikasi pada kurang optimalnya perencanaan pembangunan dan pengembangan kepemudaan.

Ditinjau dari kelembagaan, di Kabupaten Grobogan dalam rangka pelaksanaan kebijakan, telah dibentuk struktur kelembagaan, melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Grobogan. Meskipun sudah dibentuk Dinas atau Perangkat Daerah pengapum urusan kepemudaan di Kabupaten Grobogan masih belum memiliki struktur kelembagaan yang mengakomodir koordinasi lintas sektor. Jika berkaca dari kondisi ideal secara teoritis, dalam kebijakan pembangunan pemuda perlu adanya lembaga structural yang mampu mengakomodir seluruh *stakeholders* seperti Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi pemuda, pelaku usaha dan pemuda dalam menciptakan gerakan pembangunan pemuda. Struktur kelembagaan koordinasi lintas sektor sangat penting untuk dirancang agar dapat memastikan pendekatan komprehensif dalam memecahkan masalah pemuda dan menciptakan partisipasi aktif pemudas dalam kehidupan sosial-ekonomi dan politik negara. Berkaca dari tingkat nasional di Indonesia telah ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Regulasi tersebut menjadi instrument utama pembentukan kelembagaan yang komprehensif di tingkat nasional untuk pelaksanaan kebijakan pemuda di Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pembentukan tim koordinasi lintas sektor menjadi penting untuk dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mewujudkan kebijakan pemuda yang komprehensif dan partisipatif.

Tidak adanya kerangka regulasi dan kelembagaan lintas sektor yang dikembangkan dengan baik di Kabupaten Grobogan menyebabkan efektivitas mekanisme yang ada untuk implementasi kebijakan pemuda masih belum memadai. Meskipun di tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, pemerintah telah berupaya keras dalam kebijakan pemuda, pada implementasinya di tingkat Kabupaten Grobogan masih ada serangkaian masalah sistemik yang menghambat implementasi efektif program dan inisiatif yang ditujukan untuk mendukung pemuda. Salah satu masalah utama dalam implementasi kebijakan pemuda di Kabupaten Grobogan adalah kurangnya keterlibatan pemuda sendiri dalam memecahkan masalah utama mereka dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah. Kewirausahaan pemuda di Kabupaten Grobogan menghadapi beberapa tantangan signifikan yang menghambat perkembangannya.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya akses ke pendanaan, karena wirausahawan muda sering kali kesulitan mendapatkan pinjaman atau modal *ventura* karena riwayat kredit atau agunan yang terbatas. Selain itu, kurangnya bimbingan dan arahan, yang membuat banyak wirausahawan muda menavigasi lanskap bisnis yang kompleks tanpa dukungan yang memadai. Misalnya, di daerah pedesaan, kaum muda sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar, baik secara digital maupun fisik, karena infrastruktur yang tidak memadai dan keterampilan teknologi yang terbatas. Lebih jauh lagi, wirausahawan muda di Kabupaten Grobogan sering menghadapi hambatan birokrasi dan kurangnya regulasi yang efisien yang dapat memperlambat proses memulai dan menjalankan bisnis. Hambatan-hambatan ini berkontribusi pada tingginya tingkat kegagalan di antara bisnis yang dijalankan oleh kaum muda, yang selanjutnya membatasi potensi kewirausahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi.

Peneliti mencatat bahwa tingkat minat kaum muda dalam pelaksanaan kebijakan negara untuk pemuda cukup rendah. Rendahnya tingkat keterlibatan pemuda ini membatasi efektivitas langkah-langkah yang diambil dan tidak memungkinkan kebutuhan dan kepentingan nyata generasi muda untuk dipertimbangkan sepenuhnya dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pemuda di Kabupaten Grobogan. Ketidaksesuaian program pendidikan dengan persyaratan pasar tenaga kerja, menyebabkan tingginya pengangguran kaum muda dan ketidaksesuaian kualifikasi lulusan dengan kebutuhan pemberi kerja. Menurut data hasil Sakernas tingkat pengangguran pemuda (TPT) di Kabupaten Grobogan tahun 2023 adalah 12,36% (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024) lebih tinggi dengan tingkat pengangguran tenaga kerja umum di Kabupaten Grobogan yang hanya sebesar 4,02% (BPS Kabupaten Grobogan, 2025). Ketimpangan sosial dan terbatasnya kesempatan bagi kaum muda dari daerah pedesaan.

Pemuda yang daerah pedesaan cenderung menghadapi kesulitan besar dalam beradaptasi terhadap kebutuhan pangsa pasar tenaga kerja. Kesulitan-kesulitan tersebut disebabkan oleh serangkaian faktor, termasuk ketidaksesuaian keterampilan dengan persyaratan pasar tenaga kerja, kurangnya koneksi sosial yang diperlukan, dan masalah adaptasi. Selain itu terdapat perbedaan yang signifikan dalam literasi digital antara pemuda yang tinggal di pedesaan dan di perkotaan. Kesenjangan digital ini menciptakan hambatan tambahan bagi pemuda pedesaan saat mereka berupaya untuk berintegrasi ke dalam ekonomi perkotaan dan kehidupan sosial yang semakin bergantung pada teknologi digital. Masalah yang rumit ini memerlukan pendekatan multifaset yang mencakup langkah-langkah untuk mengembangkan daerah pedesaan, meningkatkan kesempatan pendidikan di daerah pedesaan, dan program-program

untuk mendukung pemuda. Perhatian khusus harus diberikan untuk meningkatkan literasi digital pemuda khususnya di pedesaan dan menciptakan peluang untuk bekerja jarak jauh, yang dapat mengurangi mobilisasi pemuda secara fisik ke kota-kota dalam mengakses pekerjaan yang berkualitas.

Kendala lain terkait kebijakan kepemudaan di Kabupaten Grobogan adalah pengembangan kewirausahaan pemuda yang tidak memadai. Meskipun ada program yang diarahkan untuk mendukung pengembangan wirausaha pemuda, terutama di bidang teknologi, namun secara kuantitas dan kualitas program tersebut masih sederhana dan belum memberikan impact yang relevan. Mekanisme yang ada di Kabupaten Grobogan untuk mendukung kewirausahaan pemuda tidak sepenuhnya mempertimbangkan kekhususan ekonomi digital dan kebutuhan wirausahawan muda di sektor-sektor inovatif. Kendala selanjutnya yang menjadi catatan dalam kebijakan kepemudaan di Kabupaten Grobogan adalah terkait kesehatan dan kesejahteraan sosial pemuda. Ditinjau dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Konsumsi Rumah Tangga (Susnas Kor), angka kesakitan pemuda di Kabupaten Grobogan Tahun 2023 adalah sebesar 10,64%, capaian ini lebih tinggi dari capaian angka kesakitan pemuda di Provinsi Jawa Tengah yang hanya sebesar 7,28% (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024). Dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan social pemuda perlu diperhatikan adanya tingkat perilaku berisiko dan masalah kesehatan mental yang tinggi, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk pengembangan pemuda yang positif.

Penilaian efektivitas program dan inisiatif yang ada di bidang kebijakan pemuda di Kabupaten Grobogan merupakan tugas kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif dan penggunaan metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Serangkaian program penting yang ditujukan untuk mendukung pemuda telah dilaksanakan antara tahun 2010 dan 2026, evaluasi efektivitas yang mengidentifikasi baik pencapaian maupun area untuk perbaikan lebih lanjut. Salah satu inisiatif utama adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Capaian program pengembangan kapasitas dan daya saing kepemudaan tersebut secara signifikan belum mampu menurunkan angka pengangguran terbuka usia muda di Kabupaten Grobogan sehingga masih perlu dipertanyakan efektivitas dalam jangka panjang dari program tersebut. Penilaian efektivitas mekanisme yang ada untuk melaksanakan kebijakan pemuda di Kabupaten Grobogan mengungkapkan baik pencapaian maupun area pembangunan dan pengembangan kepemudaan perlu untuk diperbaiki. Dikotomi ini

mencerminkan kompleksitas dan sifat multifaset dari tugas yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam memformulasikan kebijakan pembangunan kepemudaan.

Di satu sisi, kerangka regulasi komprehensif melalui koordinasi lintas sektor yang mengatur isu kebijakan pemuda telah ditetapkan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, namun masih belum direspon oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Idealnya kerangka regulasi komprehensif yang telah di susun di tingkat Nasional melalui Perpres 43 tahun 2022 yang berisi amanat penyusunan tim koordinasi lintas sektor dan penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan kepemudaan dalam diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Grogogan. Kerangka kebijakan di tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Tengah dalam pembangunan kepemudaan telah meletakkan dasar yang kokoh dan sistematis serta memberikan legitimasi bagi berbagai inisiatif dalam pembangunan kepemudaan. Kebijakan yang ada tersebut telah mengakomodir, program berskala besar untuk mendukung pembangunan kepemudaan di berbagai bidang utama antara lain bidang pendidikan dan pelatihan, bidang kesehatan, bidang ketenagakerjaan layak, bidang partisipasi dan kepemimpinan serta bidang inklusivitas dan kesetaraan gender. Program-program Perpres 43 tahun 2022 dalam telah menarik perhatian pada isu-isu pemuda di tingkat nasional yang mengarah pada tren peningkatan pendanaan untuk inisiatif dan program pemuda. Namun, terlepas dari aspek-aspek positif yang muncul dalam kebijakan di tingkat nasional tersebut, ada tantangan tertentu yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemuda secara keseluruhan. Kendala pertama adalah kurangnya koordinasi *stakeholders* yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemuda. Hal ini menyebabkan fragmentasi upaya, duplikasi fungsi, dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Lebih jauh, terlepas dari signifikansi yang dinyatakan dari partisipasi pemuda, dalam praktiknya terdapat keterlibatan kaum muda yang terbatas dalam pengembangan dan pelaksanaan program dan inisiatif. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip kebijakan pemuda modern, tetapi juga mengurangi relevansi dan efektivitas langkah-langkah yang diambil.

Tantangan lainnya adalah kurangnya penggunaan teknologi digital dan pendekatan inovatif dalam pembangunan kepemudaan. Di era digitalisasi, hal ini secara substansial membatasi jangkauan dan dampak program pemuda, terutama mengingat keterlibatan digital kaum muda yang menonjol. Kurangnya sistem yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi hasil kebijakan pemuda mempersulit penilaian objektif terhadap efektivitasnya dan membuat perbaikan arah yang cepat. Hal ini dapat menyebabkan kelanjutan program yang tidak efektif dan kurangnya perhatian terhadap inisiatif yang berhasil. Dengan demikian, meskipun

terciptanya kondisi dasar untuk pelaksanaan kebijakan pemuda yang efektif, masalah yang ada dalam koordinasi, partisipasi pemuda, penggunaan teknologi modern dan evaluasi hasil secara substansial mengurangi efektivitas keseluruhan dari upaya yang dilakukan. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan dapat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemuda di Kabupaten Grobogan secara signifikan.

Peningkatan efektivitas kebijakan pemuda di Kabupaten Grobogan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sistematis yang mengakomodasi keterkaitan berbagai aspek pembangunan kepemudaan. Elemen kunci dari pendekatan ini adalah pengembangan dan penerapan sistem yang komprehensif untuk menilai efektivitas kebijakan pemuda, berdasarkan indikator yang jelas dan pemantauan berkala. Ditingkat Nasional hingga Provinsi telah ada indikator utama yang menjadi untuk mengukur keberhasilan pembangunan pemuda yakni Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), namun pengukuran indikator ini juga belum dilakukan di Kabupaten Grobogan. Sistem penilaian dengan menggunakan IPP tidak hanya akan membantu mengevaluasi hasil kegiatan yang dilakukan, tetapi juga menyesuaikan strategi dengan segera, yang akan meningkatkan efektivitas kebijakan pemuda secara keseluruhan. Untuk menerapkan sistem evaluasi seperti itu, perlu untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan program dan inisiatif pemuda. Ini akan memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, mencegah duplikasi upaya, dan menciptakan sinergi antara berbagai program. Secara paralel, sangat penting untuk meningkatkan peluang bagi partisipasi aktif pemuda dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkatan. Ini tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan pemuda modern, tetapi juga akan memungkinkan akomodasi kebutuhan dan kepentingan nyata kaum muda, sehingga meningkatkan relevansi dan efektivitas langkah-langkah yang diambil.

Dengan digitalisasi masyarakat, penting untuk mengembangkan platform digital dan pendekatan inovatif untuk melibatkan pemuda dalam kehidupan publik dan melaksanakan inisiatif pemuda. Ini akan memperluas jangkauan audiens muda, menciptakan saluran komunikasi dan interaksi baru, dan memungkinkan pemuda untuk mengambil bagian yang lebih aktif dalam masyarakat dengan menggunakan teknologi yang biasa mereka gunakan. Aspek penting dari peningkatan efektivitas kebijakan pemuda adalah peningkatan mekanisme untuk mendukung kewirausahaan pemuda dengan fokus pada proyek-proyek inovatif dan teknologi. Ini tidak hanya akan menciptakan peluang baru untuk pemenuhan diri kaum muda tetapi juga akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan, membentuk titik-titik pertumbuhan baru di sektor-sektor ekonomi yang inovatif.

Untuk memastikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok pemuda, perlu dikembangkan program-program yang terarah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesempatan bagi pemuda dari daerah pedesaan dan kelompok rentan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan keadilan sosial, tetapi juga memaksimalkan potensi semua pemuda di negara ini, terlepas dari lokasi sosial dan geografis mereka. Langkah-langkah yang diusulkan merupakan serangkaian tindakan yang saling terkait yang bertujuan untuk secara sistematis meningkatkan efektivitas kebijakan pemuda di Kabupaten Grobogan. Implementasinya akan menciptakan sistem kerja pemuda yang lebih inklusif, adaptif, dan efektif yang memenuhi tantangan dan kebutuhan generasi muda saat ini.

4. KESIMPULAN

Pertimbangan landasan teori dan pendekatan metodologis terhadap pengembangan kebijakan kepemudaan dalam konteks modern mengungkapkan evolusi konsep yang signifikan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Selama kurun waktu tersebut adanya transisi dari model *paternalistik* ke model partisipasi aktif dan kemitraan dalam kebijakan kepemudaan. Prinsip utama kebijakan kepemudaan modern adalah subjektivitas pemuda, kolaborasi lintas sektor, inovasi, dan pendekatan yang berbeda. Penggunaan teknologi digital dan pendekatan interdisipliner terpadu dalam pengembangan dan implementasi program pemuda menjadi sangat penting.

Analisis *best practice* dalam strategi inovatif bagi kebijakan kepemudaan menunjukkan tren menuju pendekatan yang lebih terpadu, partisipatif, dan berteknologi maju. Praktik yang berhasil dicirikan oleh kolaborasi lintas sektor yang efektif, keterlibatan aktif kaum muda dalam proses pengambilan keputusan, dan penggunaan platform digital secara ekstensif. Perhatian khusus diberikan pada pengembangan keterampilan kewirausahaan, dukungan terhadap perusahaan rintisan, dan penciptaan ekosistem bagi kewirausahaan inovatif bagi pemuda.

Penilaian terhadap masalah-masalah utama dan efektivitas mekanisme yang ada untuk melaksanakan kebijakan pemuda di Kabupaten mengungkap serangkaian tantangan sistemik. Tantangan-tantangan tersebut meliputi keterlibatan pemuda yang tidak memadai dalam proses pengambilan keputusan, ketidakcukupan program pendidikan untuk memenuhi persyaratan pasar tenaga kerja, kesenjangan sosial, dan terbatasnya kesempatan bagi kaum muda dari daerah pedesaan. Meskipun telah dibuat kerangka regulasi yang komprehensif ditingkat nasional namun belum secara spesifik belum di replikasi di Kabupaten Grobogan baik dalam

bentuk penyusunan peraturan daerah terkait kepemudaan, penyusunan tim koordinasi lintas sektor, penyusunan rencana aksi kepemudaan maupun perhitungan indeks pembangunan pemuda (IPP) sebagai bentuk Evaluasi capaian kinerja pembangunan kepemudaan. Meskipun demikian dalam prakteknya telah ada program pendukung pembangunan kepemudaan yang dijalankan di Kabupaten Grobogan melalui Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, namun pelaksanaan program dukungan pemuda tersebut cenderung belum efektifitas dan ada masih belum memadai.

Berdasarkan studi yang dilakukan, peningkatan efektifitas kebijakan kepemudaan di Kabupaten Grobogan dalam menghadapi tantangan global memerlukan pendekatan yang komprehensif. Perlu untuk memperkuat kerja sama antarlembaga, memperluas kesempatan untuk keterlibatan aktif kaum muda dalam proses pengambilan keputusan, mengembangkan platform digital dan pendekatan inovatif untuk melibatkan kaum muda dalam kehidupan publik. Perhatian khusus harus diberikan untuk meningkatkan mekanisme untuk mendukung kewirausahaan pemuda dan mengembangkan program yang ditargetkan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Elemen kunci dalam meningkatkan efektifitas harus menjadi pengembangan dan implementasi sistem yang komprehensif untuk menilai efektifitas kebijakan pemuda, berdasarkan indikator yang jelas dan pemantauan rutin. Ini akan memungkinkan tidak hanya penilaian hasil dari langkah-langkah yang diambil, tetapi juga penyesuaian strategi yang cepat untuk memenuhi kebutuhan kaum muda yang berubah dan tantangan global.

Keterbatasan studi ini terkait dengan situasi global yang berubah dengan cepat dan keterbatasan data mengenai dampak jangka panjang pendekatan inovatif dalam kebijakan pemuda. Prospek untuk penelitian lebih lanjut mencakup analisis mendalam mengenai dampak digitalisasi terhadap efektifitas kebijakan pemuda, studi mengenai mekanisme untuk mengadaptasi praktik internasional dengan kondisi khusus di Kabupaten Grobogan, dan pengembangan metodologi untuk menilai dampak jangka panjang program pemuda terhadap pembangunan sosial-ekonomi di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Burkhard, B. M., Robinson, K. M., Murray, E. D., & Lerner, R. M. (2020). Positive youth development: Theory and perspective. In *The Encyclopedia of Child and Adolescent Development* (pp. 1–12). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119171492.wecad310>
- Chumak, M., Nekrasov, S., Hrychanyk, N., Prylypko, V., & Mykhalchuk, V. (2022). Applying case method in the training of future specialists. *Journal of Curriculum and Teaching*, 11(1), 235. <https://doi.org/10.5430/jct.v11n1p235>

- Cone, L., Brøgger, K., Berghmans, M., Decuypere, M., Förschler, A., Grimaldi, E., Hartong, S., Hillman, T., Ideland, M., Landri, P., van de Oudeweetering, K., Player-Koro, C., Bergviken Rensfeldt, A., Rönnerberg, L., Taglietti, D., & Vanermen, L. (2022). Pandemic acceleration: COVID-19 and the emergency digitalization of European education. *European Educational Research Journal*, 21(5), 845–868. <https://doi.org/10.1177/14749041211041793>
- Dimitrova, R., & Wiium, N. (2021). Handbook of positive youth development: Advancing the next generation of research, policy and practice in global contexts (pp. 3–16). https://doi.org/10.1007/978-3-030-70262-5_1
- Etemi, B. P., & Uzunboylu, H. (2020). The effects of flipped learning method on students' perception and learning of Java programming. *International Journal of Engineering Education*, 36(4), 1372–1382.
- Ettekal, A. V., & Agans, J. P. (2020). Positive youth development through leisure: Confronting the COVID-19 pandemic. *Journal of Youth Development*, 15(2), 1–20. <https://doi.org/10.5195/jyd.2020.962>
- Gonzalez, M., Kokozos, M., Byrd, C. M., & McKee, K. E. (2020). Critical positive youth development: A framework for centering critical consciousness. *Journal of Youth Development*, 15(6), 24–43. <https://doi.org/10.5195/jyd.2020.859>
- Junussova, A., Ayapbekova, A., Byulegenova, B., Nagymzhanova, K., & Aykenova, R. (2025). Modern strategies for conceptualising and implementing state youth policy. *World Development Perspectives*, 37, 100653. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2024.100653>
- Lerner, R. M., Lerner, J. V., Murry, V. M., Smith, E. P., Bowers, E. P., Geldhof, G. J., & Buckingham, M. H. (2021). Positive youth development in 2020: Theory, research, programs, and the promotion of social justice. *Journal of Research on Adolescence*, 31(4), 1114–1134. <https://doi.org/10.1111/jora.12609>
- Malorni, A., Dolan, S., Hong, A., Joseph, N., Mohamed, K., Moore, L., Phan, L., Skoglund, I., Too, I., & Wittman, S. (2024). Youth sociopolitical development: A conceptual framework by racial and gender minoritized youth organizers. *American Journal of Community Psychology*, 73(3–4), 473–489. <https://doi.org/10.1002/ajcp.12729>
- Masenya, T. M. (2021). Technopreneurship development (pp. 196–218). <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-5015-1.ch010>
- Nusubalieva, E., Beishenova, A., Ashymbaeva, T., Sartbekova, N., & Dogdurbek, N. (2023). Civic identity of youth as an important element of modern sociocultural transformation of society. *Social Legal Studios*, 6(4), 145–154. <https://doi.org/10.32518/sals4.2023.145>
- Opris, I., Ionescu, S. C., Lebedev, M. A., Boy, F., Lewinski, P., & Ballerini, L. (2020). Editorial: Application of neural technology to neuro-management and neuro-marketing. *Frontiers in Neuroscience*, 14, Article 53. <https://doi.org/10.3389/fnins.2020.00053>
- Ozer, E. J., Abraczinskas, M., Duarte, C., Mathur, R., Ballard, P. J., Gibbs, L., Olivas, E. T., Bewa, M. J., & Afifi, R. (2020). Youth participatory approaches and health equity:

Conceptualization and integrative review. *American Journal of Community Psychology*, 66(3–4), 267–278. <https://doi.org/10.1002/ajcp.12451>

Podolyaka, A., Kolisnichenko, R., Syur, N., & Hora, A. (2021). Economic and legal and psychological conditions of professional self-realization of youth in Ukraine. *Social Legal Studies*, 4(4), 155–163. <https://doi.org/10.32518/2617-4162-2021-4-155-163>

Uludag, K. (2023). Exploring the hidden aspects of ChatGPT: A study on concerns regarding plagiarism levels. *Scientific Studios on Social and Political Psychology*, 29(1), 43–48. <https://doi.org/10.61727/sssppj/1.2023.43>

Walther, A., Lüküslü, D. G., Loncle, P., & Pais, A. (2021). Regimes of youth participation? Comparative analysis of youth policies and participation across European cities. *YOUNG*, 29(2), 191–209. <https://doi.org/10.1177/1103308820937550>